

PENGARUH KONEKSI POLITIK, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)**

Alviana Yunita Layli¹, Nor Aini², Sintia Dewi Kartikasari³

^{1,2,3} Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Pamulang

Email: alvianayunita1606@gmail.com,

ABSTRACT

This study aims to determine how the influence of Political Connections, Institutional Ownership and Audit Committees on Tax Aggressiveness. This type of research uses associative quantitative, the research object is mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023, using a purposive sampling method in collecting data samples and the type of data used is secondary data. The total population in this study was 10 companies and the total sample was 6 companies so that 30 observation data were obtained in this study. Data analysis used in this research uses panel data regression using the Eviews 13 test tool. The results of the research show that Political Connections, Institutional Ownership and Audit Committees influence Tax Aggressiveness simultaneously, Political Connections have no influence on Tax Aggressiveness, Institutional Ownership has no influence on Tax Aggressiveness. Tax Aggressiveness, and the Audit Committee have no effect on Tax Aggressiveness.

Keywords: Tax Aggressiveness; Political Connections; Institutional Ownership; Audit Committees

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif asosiatif, objek penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023, menggunakan metode purposive sampling dalam pengumpulan sampel data serta jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Jumlah populasi dalam penelitian ini ada 10 perusahaan dan total sampel sebanyak 6 perusahaan sehingga didapatkan 30 data observasi dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan menggunakan alat uji Eviews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak secara

simultan, Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Kata Kunci: *Agresivitas Pajak; Koneksi Politik; Kepemilikan Insitusional; Komite Audit*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran bersifat wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara untuk memenuhi berbagai keperluan dan kepentingan negara, seperti menyediakan fasilitas umum untuk masyarakat, infrastruktur negara dan lain-lainnya (Nordiansyah et al., 2022). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara yang jumlahnya cukup besar (Prasetyo & Wulandari, 2021). Perusahaan memandang pajak sebagai salah satu jenis biaya tambahan yang dapat meningkatkan keuntungan. Karena itu, perusahaan memutuskan untuk melaksanakan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak terdiri dari tindakan-tindakan yang menunda, mengurangi atau bahkan meniadakan beban pajak (Martinez & Ferreira, 2019). Oleh karena itu perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak atau yang disebut agresivitas pajak yang tepat agar perusahaan membayar pajak seefisien mungkin sepanjang hal tersebut sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku (Hamadah, 2010).

Praktik agresivitas pajak telah menimbulkan masalah yang kompleks dalam ranah ekonomi dan sosial. Selain menyebabkan kerugian signifikan dalam pendapatan pajak negara, praktik ini juga menyebabkan ketidaksetaraan dalam kontribusi pajak antara perusahaan. Lembaga Tax Justice Network pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun.

Tindakan agresivitas pajak menurut Ngadiman & Puspitasari (2017) disebabkan salah satunya oleh ukuran perusahaan. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar akan memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan tax avoidance. Sedangkan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah (Lestari dan Febrianty, 2016). Ukuran perusahaan menurut (Ni Luh Ayu, 2016) merupakan besar atau kecilnya suatu gambaran perusahaan yang dimana perusahaan besar lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dari luar baik dalam bentuk modal saham atau dalam bentuk hutang sebab besarnya perusahaan menjadi reputasi yang cukup dimata masyarakat. Untuk menentukan besar kecilnya ukuran perusahaan bisa dilihat dari total aktiva, penjualan, total penjualan, rata-rata total aktiva.

Faktor lainnya adalah koneksi politik. Koneksi politik ini suatu keadaan wajib pajak adanya keistimewaan seperti rendahnya kemungkinan risiko untuk dilakukan pemeriksaan pajak (Solikin & Slamet, 2022). Oleh karena itu, semakin banyak koneksi politik yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Asadanie & Venusita, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah & Lingga (2021) juga menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian tersebut memiliki hasil yang tidak sejalan dengan penelitian Hafizh & Asalam (2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya (Azmi & Ramadhani, 2019). Investor Institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dan dapat menyalurkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Keputusan yang diambil manajemen akan sesuai dengan keinginan pihak Institusional dan perusahaan akan mematuhi segala perintah termasuk dalam melakukan tindakan Agresivitas pajak dengan meminimalkan beban pajak untuk mendapat keuntungan yang lebih besar bagi pihak Institusional.

Beberapa penelitian terdahulu membahas pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian dari Rennath dan Trisnawati (2023) serta penelitian dari Pratiwi dan Ardiyanto (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sementara penelitian dari Ramadhani dan Azmi (2019) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak masih belum konsisten.

Komite audit, sebagai lembaga dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas pengawasan proses audit dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta standar akuntansi, memiliki peran penting dalam pengendalian praktik agresivitas pajak perusahaan. Dengan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, komite audit dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencegah praktik-praktik yang tidak etis atau meragukan dalam perpajakan. Misalnya, melalui pemeriksaan yang cermat terhadap laporan keuangan dan praktik perpajakan perusahaan, komite audit dapat mengidentifikasi potensi risiko atau kecenderungan untuk melakukan praktik agresif dalam perpajakan. Selain itu, komite audit juga dapat berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terkait dengan kebijakan perpajakan mereka. Dengan demikian, keberadaan dan fungsi yang efektif dari komite audit dapat membantu mengurangi praktik agresivitas pajak perusahaan, serta memperkuat kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku.

Penelitian terdahulu telah memberikan pandangan yang bervariasi tentang hubungan antara peran komite audit dan praktik agresivitas pajak dalam perusahaan. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Nur Afifah Yuliani dan Dewi Prastiwi (2021) menemukan bahwa keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik agresivitas pajak. Namun, temuan tersebut tidak selalu konsisten, karena menurut Suci Kurnia Rahmayanti, Ekawati Jati Wibawaningsih, Agus Maulana (2021) menunjukkan bahwa peran komite audit memiliki dampak yang positif dalam mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam hasil penelitian sebelumnya tentang hubungan antara komite audit dan agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, uraian teori dan penelitian terdahulu yang masih belum konsisten, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Manajemen Laba, Struktur Kepemilikan dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahayu, Ramadhanti, & Widodo (2018) memiliki asumsi bahwa suatu entitas dipisahkan dari pemiliknya. Hubungan agensi merupakan hubungan antara satu atau lebih prinsipal (dalam hal ini pemegang saham) dengan agen (manajemen perusahaan) dalam pengambilan tindakan sesuai dengan kepentingan mereka termasuk pemberian otoritas dalam pengambilan keputusan oleh agen. Konflik agensi akan timbul ketika agen mengutamakan kepentingan pribadi dan tidak mengikuti keinginan dari prinsipal. (Imorakamul & Eriswandari 2021)

2.1.2 Agresivitas Pajak

Manipulasi penghasilan kena pajak perusahaan, baik secara legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion), disebut sebagai agresivitas pajak perusahaan (Magfira & Murtanto, 2021). Kurangnya kepatuhan terhadap aturan pajak dan terlibat dalam operasi penghematan pajak yang tidak diizinkan oleh peraturan dapat menyebabkan agresivitas pajak dari pihak perusahaan. Bahkan jika tidak melanggar hukum, bisnis yang secara hukum menggunakan celah pajak tetap dianggap sudah melakukan agresivitas pajak (Sri Handayani 2021)

2.1.3 Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan sebuah hubungan antara pimpinan perusahaan yakni direksi atau komisaris dengan pemerintah. Hubungan yang dimaksud ialah direksi atau komisaris dalam perusahaan pernah menjabat atau memiliki relasi di suatu lembaga pemerintah. Apabila suatu perusahaan memiliki koneksi politik maka akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, memiliki risiko pemeriksaan pajak

yang rendah serta mendapatkan keleluasaan untuk memperoleh pinjaman modal (Fadhillah & Lingga, 2021). Tentunya hal ini akan membuat manajemen perusahaan akan bertindak oportunistik dengan memanfaatkan hubungan dengan pemerintah untuk melakukan agresivitas pajak. Menurut Trisnwati dan Firmansyah (2022) perusahaan yang memiliki koneksi politik umumnya sering melakukan penghindaran pajak. dikarenakan perusahaan mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah..

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan institusional salah satu subjek yang penting, Menurut Dewi (2019) Asuransi, perusahaan, pemerintah dan bank jika memegang saham maka termasuk sebagai kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dengan proporsi besar dapat membuat manajer untuk mengontrol atau memastikan segala keputusan agar manajer bisa memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham(Dwi & Syahril, 2021). Hal ini sesuai dengan tujuan investor memperoleh keuntungan dan perusahaan tidak memerlukan biaya yang banyak untuk membayar pajaknya.

2.1.5 Komite Audit

Komite audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris guna membantu menjalankan tugasnya yaitu mendorong penerapan corporate governance, pembentukkan struktur pengendalian internal yang tepat, dan meningkatkan kualitas pengungkapan dan pelaporan keuangan perusahaan. Di dalam peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 pasal 7e komite audit terdiri dari setidaknya tiga orang, dan setidaknya satu anggota dengan latar belakang pendidikan dengan keahlian akuntansi atau keuangan. Dengan demikian komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan mengetahui adanya kelemahan dalam regulasi perpajakan dan bagaimana langkah-langkah menghindari risiko yang ditemukan (Pramesty, 2020).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya (Azmi & Ramadhani, 2019). Pemilik institusional memiliki peran penting dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015). Salah seorang dari anggota komite audit wajib berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan agar dapat memudahkan anggota komite audit dalam memahami dan memberikan pandangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah keuangan sehingga akan meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Dengan adanya pengawasan dari komite audit maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak cenderung berkurang (Agus Alifia Putri & Rheny Afriana Hanif, 2020)

H1 : Diduga koneksi politik, kepemilikan institusional, dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan secara simultan terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Koneksi politik ini suatu keadaan wajib pajak adanya keistimewaan seperti rendahnya kemungkinan risiko untuk dilakukan pemeriksaan pajak (Solikin & Slamet, 2022). Oleh karena itu, semakin banyak koneksi politik yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Asadanie & Venusita, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah & Lingga (2021) juga menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian tersebut memiliki hasil yang tidak sejalan dengan penelitian Hafizh & Asalam (2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H2 : Diduga koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya (Azmi & Ramadhani, 2019). Menurut penelitian dari Rennath dan Trisnawati (2023) serta penelitian dari Pratiwi dan Ardiyanto (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sementara penelitian dari Ramadhani dan Azmi (2019)

menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak masih belum konsisten.

H3 : Diduga kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

2.4.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit, sebagai lembaga dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas pengawasan proses audit dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta standar akuntansi, memiliki peran penting dalam pengendalian praktik agresivitas pajak perusahaan. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Nur Afifah Yuliani dan Dewi Prastiwi (2021) menemukan bahwa keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik agresivitas pajak. Namun, temuan tersebut tidak selalu konsisten, karena menurut Suci Kurnia Rahmayanti, Ekawati Jati Wibawaningsih, Agus Maulana (2021) menunjukkan bahwa peran komite audit memiliki dampak yang positif dalam mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan.

H4 : Diduga komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

3. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder laporan keuangan maupun informasi dalam bentuk lain dari Bursa Efek Indonesia (BEI) situs www.idx.co.id periode 2019-2023. Periode ini dipilih karena tingginya tingkat agresivitas pajak sehingga penerimaan pajak tidak bisa maksimal. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 7 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019- 2023. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga kriteria lainnya adalah sebagai berikut:

- Perusahaan secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahun 2019-2023.
- Perusahaan menggunakan mata uang rupiah pada laporan keuangannya.
- Perusahaan memiliki kelengkapan data variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian

Dengan kriteria di atas, didapat sampel perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian adalah 8 perusahaan. Total observasi pada penelitian ini berjumlah 40. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang artinya menggunakan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan mencatat informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan auditan

perusahaan sampel. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi E-views versi 13. Dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji statistik deskriptif, analisis data, uji asumsi klasik, uji regresi data panel, dan uji hipotesis.

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian tanpa memberikan suatu makna/kesimpulan. Data statistik penelitian ini dapat dilihat pada nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum (Ghozali, 2018)

Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari :

- Uji multikolinearitas berfungsi untuk mengukur tingkat asosiasi (keeratn) hubungan/pengaruh antar variabel bebas melalui besaran koefisien korelasi (r)
- Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Uji Normalitas ini dilihat dengan dua cara yaitu dengan uji statistik dan analisis grafik. Analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Kriteria adalah sebagai berikut :
 - 1) Jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal.
 - 2) Jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal.
- Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, dapat digunakan uji Durbin Watson (DW).
- Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Beberapa cara untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat Grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Cara lain pengujian ini adalah uji Park, dilakukan dengan cara menregresikan variabel independen dengan nilai logaritma natural residual yang telah dikuadratkan. Kriteria uji Park adalah jika Sig. lebih besar dari 0,05 maka tidak ada masalah dan jika jika Sig. lebih kecil dari 0,05.

Uji Regresi Data Panel

Uji regresi data panel adalah teknik yang menggabungkan dua jenis data yaitu data silang (cross-section) dan data runtut waktu (time series). Data panel sering juga disebut dengan pooled data (pooling time series dan cross-section) (Ghozali & Ratmono, 2018:195)

Uji Hipotesis

Uji hipotesis untuk mengetahui kebenaran dari perhitungan korelasi, diperlukan pengujian hipotesa. Untuk mengujinya dilakukan dengan membandingkan antara t tabel dan t hitung.

3.1 Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2021) variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak.

3.1.1.1 Agresivitas Pajak (Y)

Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan yang merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) ataupun ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (tax evasion) (Hidayat & Muliasari, 2020). Agresivitas pajak merupakan praktik penghindaran pajak mulai dari perencanaan legal hingga perencanaan ilegal seperti kesalahan pelaporan dengan memanipulasi pendapatan kena pajak, menilai pengeluaran terlalu tinggi, hingga melanggar aturan perpajakan yang berlaku (Dhahri, 2021). Agresivitas perusahaan diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR). Rumus perhitungan ETR yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut (Cahyadi, Surya, Wijaya, et al., 2020) :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.1.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2019 : 69) Variabel Independen sering disebut sebagai variabel bebas, variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

3.1.2.1 Koneksi Politik (X1)

Koneksi politik merupakan sebuah hubungan antara pimpinan perusahaan yakni direksi atau komisaris dengan pemerintah. Hubungan yang dimaksud ialah direksi atau komisaris dalam perusahaan pernah menjabat atau memiliki relasi di suatu lembaga pemerintah. Apabila suatu perusahaan memiliki koneksi politik maka akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, memiliki risiko pemeriksaan pajak yang rendah serta mendapatkan kekeluasaan untuk memperoleh pinjaman modal (Fadhillah & Lingga, 2021).

Pengukuran koneksi politik penelitian dengan *dummy* ini, diberi nilai 1 apabila pada perusahaan terdapat kepemilikan saham dari pemerintah (BUMN) dan 0 apabila tidak ada. Dinilai dari adanya kepemilikan saham pemerintah sebesar 25% yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 4 tentang hubungan istimewa. Kepemilikan saham minimal 25% oleh pemerintah mengindikasikan adanya koneksi politik (Kadek ayu windaswari dan Ni ketut lely aryani merkusiwati, 2018)

3.1.2.2 Kepemilikan Institusional (X2)

Kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah keagenan sebab timbulnya konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan mendorong pemegang saham pada posisi yang kuat untuk mengendalikan manajemen secara efektif. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini dihitung dengan presentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar. Semakin besar perbandingan kepemilikan institusional maka semakin mengurangi penghindaran pajak. Pengukuran kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

3.1.2.3 Komite Audit (X3)

Peran komite audit menjadi semakin penting dalam memastikan kepatuhan dan mengelola risiko terkait dengan agresivitas pajak. Komite audit memiliki peran krusial dalam mengawasi kegiatan perpajakan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi praktik perpajakan perusahaan secara menyeluruh, mengidentifikasi potensi risiko dan kesesuaian dengan regulasi, serta memberikan rekomendasi kepada manajemen terkait strategi perpajakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip

kepatuhan dan keberlanjutan. Keahlian Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan agar mampu memahami laporan keuangan (Kep-643/Bl/2012). Keahlian Komite Audit diukur dengan rumus jumlah Komite Audit dengan keahlian finansial atau akuntansi dibagi jumlah total Komite Audit (Sun et al., 2014).

$$KA = \Sigma \text{Jumlah komite audit}$$

3.1.3 Indikator Variabel Operasional

Tabel 1. Variabel Operasional

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Y Agresivitas Pajak	ETR = Beban pajak penghasilan / Laba sebelum pajak	Rasio
2	X1 Koneksi Politik	Pengukuran koneksi politik penelitian dengan dummy ini, diberi nilai 1 apabila pada perusahaan terdapat kepemilikan saham dari pemerintah (BUMN) dan 0 apabila tidak ada. Dinilai dari adanya kepemilikan saham pemerintah sebesar 25% yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 4 tentang hubungan istimewa. Kepemilikan saham minimal 25% oleh pemerintah mengindikasikan adanya koneksi politik (Kadek ayu windaswari dan Ni ketut lely aryani merkusiwati, 2018)	Nominal
3	X2 Kepemilikan Institusional	KI = Jumlah saham institusi / Jumlah saham beredar	Rasio
4	X3 Komite Audit	KA = Σ Jumlah komite audit	Rasio

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	ETR	KP	KI	KA
Mean	289056.3	0.333333	625560.2	3.266667
Median	256587.5	0.000000	650001.0	3.000000
Maximum	717842.0	1.000000	854927.0	6.000000
Minimum	6658.000	0.000000	199868.0	2.000000
Std. Dev.	139339.6	0.479463	188795.4	0.784915
Skewness	0.915377	0.707107	-0.879194	1.242939
Kurtosis	4.810694	1.500000	2.879409	6.197483
Jarque-Bera	8.287839	5.312500	3.883088	20.50436
Probability	0.015861	0.070211	0.143482	0.000035
Sum	8671689.	10.00000	18766805	98.00000
Sum Sq. Dev.	5.63E+11	6.666667	1.03E+12	17.86667
Observations	30	30	30	30

Sumber : Data diolah dengan eviews 13, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah observasi dari penelitian ini adalah sebanyak 30 pengamatan. Dalam tabel tersebut variabel agresivitas pajak memiliki nilai terendah sebesar 6658.0000 dimiliki oleh PT. Timah Tbk. tahun 2023 dan nilai tertinggi senilai 717842.000 dimiliki PT. Aneka Tambang Tbk. tahun 2019 dengan nilai rata-rata 289056.3 dan standar deviasi sebesar 139339,6. Variabel koneksi politik memiliki nilai terendah 0.000000 dimiliki oleh PT. Adaro Energy Indonesia Tbk., PT. Harum Energy Tbk., PT. Bumi Resources Tbk. dan PT. Ifishdeco Tbk. tahun 2019 sampai dengan 2023. Nilai tertinggi senilai 1,000000 dimiliki oleh PT. Aneka Tambang Tbk. dan PT. Timah Tbk. dengan nilai rata-rata 0.333333 dan standar deviasi sebesar 0.479463. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai terendah 199868.0 dimiliki oleh PT. Bumi Resources Tbk. tahun 2021. Nilai tertinggi senilai 854927.0 dimiliki oleh PT. Harum Energy Tbk. dengan nilai rata-rata 625560.2 dan standar deviasi sebesar 188795.4. Variabel komite audit memiliki nilai terendah 2.000000 dimiliki oleh PT. Timah Tbk. tahun 2022. Nilai tertinggi senilai 6.000000 dimiliki oleh PT. Aneka Tambang Tbk. dengan nilai rata-rata 3.266667 dan standar deviasi sebesar 0.784915.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Chow-Test yang bertujuan untuk menguji atau juga membandingkan dan memilih model mana yang terbaik apakah model Common Effect atau Fixed Effect yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel (MR. Ramzi 2018), Uji Hausman Test dilakukan untuk membandingkan atau juga memilih model mana yang terbaik antara Fixed effects dengan Random effects yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel, dan Uji Lagrange Multiplier (LM) memiliki tujuan untuk membandingkan antara metode common effects dengan metode random effects.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.932243	(5,22)	0.4793
Cross-section Chi-square	5.765024	5	0.3298

Sumber : Data diolah dengan evIEWS 13, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa model yang tepat adalah *Common Effect Model* (CEM). Dapat dilihat dari nilai prob. Cross section C sebesar 0.4793 lebih besar dari taraf signifikansi (0.05) maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.678351	2	0.4321

Sumber : Data diolah dengan evIEWS 13, 2024

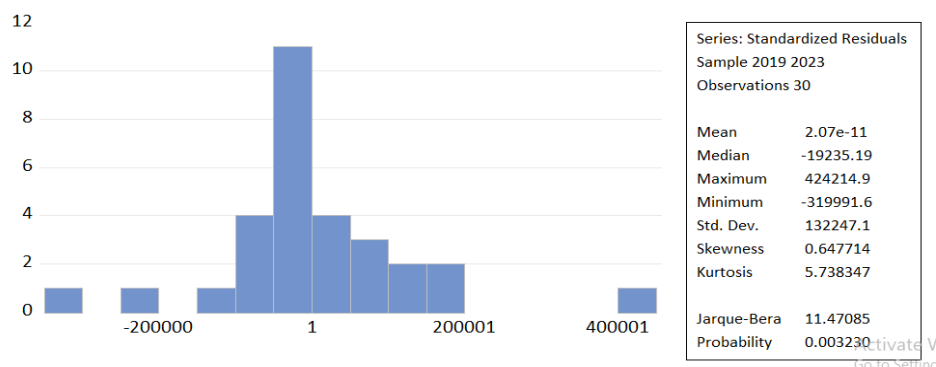
Tabel 4 menunjukkan bahwa model yang tepat adalah *Random Effect Model* (REM). Dapat dilihat dari nilai prob. Cross section Random sebesar 0.4321 lebih besar dari taraf signifikansi (0.05) maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier tidak dilakukan karena hasil dari uji chow = uji hausman.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data diolah dengan evIEWS13, 2024

Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai *Jarque-Bera* sebesar 11.47085 dengan nilai *probability* sebesar 0.003230 (0,323%) dimana nilai *probability* lebih kecil dari

taraf signifikansi (0.05). Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang tidak terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	7.29E+10	101.1361	NA
KP	3.55E+09	1.407729	1.005521
KI	0.031199	20.85498	1.698811
KA	3.30E+09	45.60581	1.704113

Sumber : Data diolah dengan eviews 13, 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai *Centered* VIF untuk variabel koneksi politik, kepemilikan institusional dan komite audit memiliki nilai kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.099211	Mean dependent var	289056.3
Adjusted R-squared	-0.004726	S.D. dependent var	139339.6
S.E. of regression	139668.5	Sum squared resid	5.07E+11
F-statistic	0.954529	Durbin-Watson stat	1.935815
Prob(F-statistic)	0.428868		

Sumber : Data diolah dengan eviews13, 2024

Tabel 6 menunjukan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.935815 lebih besar dari nilai (dU) 1,7214 dan kurang dari (4-dU) 2,2786. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi karena nilai *Durbin-Watson* terletak diantara dU dan 4-dU ($1.7214 < 1.935815 < 2,2786$).

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	3.383018	Prob. F(3,17)	0.0425
Obs*R-squared	7.850371	Prob. Chi-Square(3)	0.0492
Scaled explained SS	9.447095	Prob. Chi-Square(3)	0.0239

Sumber : Data diolah dengan eviews13, 2024

Tabel 8 menunjukkan bahwa Obs*R-squared mempunyai nilai prob. Chi-Square sebesar 0.0492 lebih kecil

dari taraf signifikansi (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada gejala heteroskedastisitas yang terjadi.

Uji Regresi Data Panel

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	196881.7	179916.8	1.094293	0.2839
KP	-43298.62	60798.73	-0.712163	0.4827
KI	-0.081939	0.149903	-0.546613	0.5893
KA	48326.08	39114.88	1.235491	0.2277

Sumber : Data diolah dengan eviews 13, 2024

Dari tabel 7, uji regresi berganda diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$NP = 196881.7 + 48326.08KA - (-0.081939)KI + (-443298.62)KP + e$$

Hasil persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 196881.7 artinya jika variabel komite audit, kepemilikan institusional dan koneksi politik dianggap konstan, maka hasil agresivitas pajak sebesar 196881.7
2. Nilai koefisien koneksi politik sebesar -0,081939 artinya setiap peningkatan 1% komite audit maka agresivitas pajak akan mengalami kenaikan - 443298.62
3. Nilai koefisien kepemilikan institusional sebesar -0,081939 artinya setiap peningkatan 1% komite audit maka agresivitas pajak akan mengalami penurunan -0,081939
4. Nilai koefisien komite audit sebesar 48326.08 artinya setiap peningkatan 1% komite audit maka agresivitas pajak akan mengalami kenaikan 48326.08

Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.099211	Mean dependent var	289056.3
Adjusted R-squared	-0.004726	S.D. dependent var	139339.6
S.E. of regression	139668.5	Sum squared resid	5.07E+11
F-statistic	0.954529	Durbin-Watson stat	1.935815
Prob(F-statistic)	0.428868		

Sumber: Data diolah dengan eviews13, 2024

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0.099211 (9%) artinya variabel dependen yaitu agresivitas pajak dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (komite audit, kepemilikan institusional dan koneksi politik) sebesar 9%. Sedangkan sisanya sebesar 91% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa nilai prob (F-Statistic) 0.428868 dimana lebih besar dari taraf signifikansi (0.05) H1 diterima yaitu komite audit, kepemilikan institusional dan koneksi politik secara simultan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan tabel 8, maka hasil dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Nilai probabilitas variabel green accounting diperoleh nilai sebesar 0,4840 dimana lebih besar dari taraf signifikansi (0,05) sehingga H2 ditolak yang artinya koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hafizh & Asalam (2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah & Lingga (2021) juga menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Nilai probabilitas variabel struktur modal diperoleh nilai sebesar 0.5904 dimana lebih besar dari taraf signifikansi (0,05) sehingga H3 ditolak yang artinya kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rennath dan Trisnawati (2023) serta penelitian dari Pratiwi dan Ardiyanto (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Azmi

(2019) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Nilai probabilitas variabel komite audit (X3) diperoleh nilai sebesar 0.2290 dimana lebih besar dari taraf signifikansi (0,05) sehingga H4 ditolak yang artinya komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Afifah Yuliani dan Dewi Prastiwi (2021) menemukan bahwa keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik agresivitas pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Kurnia Rahmayanti, Ekawati Jati Wibawaningsih, Agus Maulana (2021) menunjukkan bahwa peran komite audit memiliki dampak yang positif dalam mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Koneksi politik, kepemilikan institusional dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan agresivitas pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagi perusahaan, dapat lebih memperhatikan faktor-faktor dasar yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak.
2. Bagi Investor, hasil analisis ini merupakan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi risiko investasi dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian agresivitas pajak pada sektor maupun sub sektor lainnya. Dan diharapkan dapat menambahkan variasi variabel lain untuk mencapai penjelasan yang lebih meyakinkan mengenai agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Nordiansyah et al., 2022. "Peranan Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Leverage Pada Agresivitas Pajak". *Journal of Management*, vol. 5, no. 3, 2022.
- Prasetyo dan Wulandari. 2021. "Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak". *Jurnal Akuntansi*, vol. 13, no. 1, Mei 2021.
- Ngadiman dan Puspitasari. 2017. "Pengaruh Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi*, vol. 5, no. 2, Desember 2017.
- Lestari dan Febrianty. 2016. "Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)". *Journal. E-jurnal Universitas Widyatama*.
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270–283. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521>
- Asadanie dan Venusita. 2020. "Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Manajemen*, vol. 16, no. 1, 2022.
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012>
- Hafizh & Asalam (2022). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial, Dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak (studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). *Jurnal Manajemen*, vol. 9, no. 2, April 2022.

- Azmi, F., & Ramadhani, L. (2019). Factors Affecting Tax Aggressiveness In Plantation Companies Listed 2014-2017. *Journal of Accounting Science*, 3(1), 49-59. <https://doi.org/10.21070/jas.v3i1.2678>
- Rennath dan Trisnawati. 2023. "Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Volume V No. 1/2023 Edisi Januari Hal: 423-434.
- D. Anggraeni Pratiwi, and M. D. Ardiyanto, "PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 7, no. 4, Nov. 2019.
- Afifah Yuliani dan Dewi Prastiwi. 2021. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institutional Terhadap Agresivitas Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 9, no. 1, 2021.
- Rahayu, Ramadhanti, dan Widodo. 2018. Analisis Pengaruh gender direksi dan komisaris, manajemen laba, serta kinerja perusahaan terhadap kompensasi manajemen puncak di ASEAN. November, 2018.
- Imora kamul & Erni Risswandari. 2021. "Pengaruh Gender Diversity Dewan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak". *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Mei 2021.
- Magfira & Murtanto. 2021. PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Volume. 8 Nomor. 1 Februari 2021 : 109-122 .
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. 2020. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14–21.
- Yuliani, Nur Afifah, Dewi Prastiwi, Jurusan Akuntansi, and Fakultas Ekonomi. 2021. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 9 (1): 141–48. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>.
- Agus Alifia Putri, & Rheny Afriana Hanif. 2020. PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AGRESIVITAS

PAJAK. Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, Volume.1 Nomor.3
November 2020 :384-401